



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
MINISTRY OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
PUSAT PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA
CENTER FOR HUMAN RESOURCE TRAINING

Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Widyaprada

Modul

Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19 Bojongsari, Depok 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174
Website : <https://ppsd.kemendikdasmen.go.id> Email : ppsdm@kemendikdasmen.go.id

Hak Cipta © PPSDM Kemdikdasmen
Edisi Tahun 2025

Modul Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional
Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Widyaprada

Penanggung Jawab:
Hanjar Basuki, S.Kom, M.M.

Ketua:
Dewi Andayani, S.E.Ak, MAB

Penyusun:
Harris Iskandar, Ph.D
Dr. Abdul Kahar, M.Pd.

Editor:
Jarni, M.Pd.

Tata Letak:
Tim PPSDM Kemendikdasmen

Depok – Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia – 2025
20 + vii hlm: 21 x 29,7 cm

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Raya Ciputat-Parung Km 19, Bojongsari, Depok 16517 Telepon Telepon (021) 7490411
Website: <https://ppsdm.kemendikdasmen.go.id/>

KATA PENGANTAR

Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan melalui kegiatan pendampingan, pembimbingan, supervisi, dan/atau pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat telah sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang telah ditetapkan. Widyaprada diharapkan mampu mendampingi satuan Pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengolah data dan mendukung ketersediaan data Pendidikan sehingga mampu melakukan perencanaan Pendidikan berbasis data.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Dasar dan Menengah menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Widyaprada. Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Widyaprada memuat substansi materi: Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional; Peran Jabatan Fungsional Widyaprada; Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Standar Pelayanan Minimal; Pemetaan Mutu Pendidikan; Pendampingan dan Pembimbingan Mutu Pendidikan; Supervisi Mutu Pendidikan; Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan; Komunikasi dan Advokasi; dan Pemanfaatan TIK. Substansi materi tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan kompetensi kepada peserta pelatihan dengan harapan dapat meningkatkan kinerjanya

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi peserta Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Widyaprada, sehingga peserta dapat meningkatkan kompetensinya dan dapat mengaplikasikan materi ajar yang telah diperoleh di tempat bekerja masing-masing.

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kepala,

Ttd.

Hanjar Basuki, S.Kom.,M.M.
NIP 197011211998031002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR HAKI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Hasil Belajar	2
D. Indikator Hasil Belajar.....	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
BAB II MATERI	15
A. Indikator Keberhasilan.....	15
B. Manfaat bahan ajar bagi peserta	16
C. Pengenalan dan cara penggunaan modul	16
D. Latihan	17
E. Rangkuman	18
BAB III PENUTUP	19
A. Penutup	19
B. Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelatihan fungsional Widyaprada adalah upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi dalam penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Widyaprada memiliki peran penting dalam memastikan **Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional** dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam konteks transformasi pendidikan nasional saat ini, terutama dengan kebijakan-kebijakan baru, pembangunan kualitas pendidikan menghadapi banyak tantangan dan peluang. Oleh karena itu, para Widyaprada perlu memahami secara mendalam kebijakan di bidang pendidikan, program prioritas yang menjadi fokus pemerintah, serta mekanisme implementasinya di lapangan. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk melakukan pembimbingan dan pendampingan yang berbasis data mutu pendidikan serta merancang fasilitasi yang mampu mempercepat pencapaian standar nasional pendidikan.

Pelatihan ini dirancang agar peserta mampu mengintegrasikan pemahaman kebijakan nasional dengan praktik lapangan, sehingga dapat mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk menyusun program pemenuhan mutu pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, modul ini bertujuan membekali Widyaprada dengan wawasan terkini terkait agenda prioritas pemerintah di sektor pendidikan, sehingga pendampingan yang dilakukan menjadi relevan, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan dampak positif langsung pada peningkatan mutu pendidikan.

Dengan latar belakang tersebut, pelatihan ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme Widyaprada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penjaminan mutu pendidikan, mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh tentang konsep dasar pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi pada satuan pendidikan serta pemerintah daerah yang menjadi tugas utama Widyaprada. Materi menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebijakan dan program prioritas pendidikan nasional, seperti; Program wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru; Penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceriah; Pembelajaran mendalam; Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial; Tes Kemampuan Akademik (TKA); dan Penguatan Pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi.

Melalui metode pembelajaran interaktif seperti ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan kerja kelompok, peserta pelatihan diajak memahami peran strategis Widyaprada dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan dan program prioritas secara efektif. Modul juga menekankan penggunaan data mutu pendidikan sebagai dasar pembimbingan dan pendampingan, sehingga pelaksanaan tugas Widyaprada dapat meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan secara nyata di lapangan.

Modul ini menjadi landasan utama bagi Widyaprada dalam memahami kebijakan dan program prioritas pendidikan nasional untuk memperkuat perannya dalam penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan daerah.

C. Hasil Belajar

Hasil pembelajaran dari modul ini diharapkan peserta mampu melakukan pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi berbasis data mutu pendidikan, serta meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural guna mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

D. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat:

1. Memahami kebijakan pendidikan nasional.
2. Mengetahui program-program prioritas pendidikan nasional.
3. Melaksanakan peran pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi sebagai Widyaprada dalam implementasi kebijakan dan program prioritas Pendidikan.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok: Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional

1. Kebijakan Pendidikan Nasional

Sub materi:

- a. Landasan hukum dan dasar filosofis Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Visi, misi, dan tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Standar Nasional Pendidikan.
- d. Kebijakan Pembelajaran Mendalam.
- e. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Kebijakan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

2. Program Prioritas Pendidikan Nasional

Sub materi:

- a. Program Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan Pendidikan;

Perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Dari sebelumnya 9 tahun, kini pendidikan dasar akan diperluas mencakup 13 tahun pembelajaran formal. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.

Program Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia yang mulai diterapkan secara resmi sejak tahun ajaran 2025-2026. Program ini memperluas wajib belajar dari sebelumnya 9 tahun (SD dan SMP) menjadi 13 tahun, yang mencakup Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dan 1 tahun prasekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Adapun latar belakang program wajib belajar 13 tahun ini meliputi :

- 1) Masih banyak anak yang belum dapat mengakses pendidikan menengah secara optimal, terutama di daerah terpencil dan kawasan tertinggal, serta angka putus sekolah dan anak tidak bersekolah yang relatif tinggi.
- 2) Pemerintah menyadari perlunya memperkuat dan memperluas akses pendidikan sampai minimal tingkat SMA/SMK agar bisa membekali lulusan dengan keterampilan dan kapasitas yang sesuai kebutuhan masa depan.
- 3) Pendidikan anak usia dini terbukti meningkatkan kesiapan masuk sekolah dasar. Data menunjukkan, anak yang mengikuti TK memiliki kemampuan adaptasi 40% lebih baik dari yang tidak pernah mendapatkan layanan TK.
- 4) Pendidikan selama 9 tahun dianggap sudah tidak cukup untuk mempersiapkan sumber daya manusia berdaya saing global karena

menengah atas (SMA/SMK) menjadi jenjang penting untuk penguasaan kompetensi abad 21.

- 5) Perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi menuntut generasi muda memiliki keterampilan lebih lengkap dan daya saing yang lebih baik.

Sedangkan Tujuan Program Wajib Belajar 13 Tahun mencakup :

- 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan di jenjang menengah atas/ lengkap (SMA/SMK) agar lebih banyak anak Indonesia menuntaskan pendidikan hingga tingkat menengah.
- 2) Mengurangi angka putus sekolah dan anak tidak sekolah terutama di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).
- 3) Membekali lulusan pendidikan menengah dengan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, berpikir kritis, kemampuan adaptasi, guna meningkatkan daya saing nasional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh sesuai visi Indonesia Emas 2045.
- 5) Menjamin pemerataan akses pendidikan formal gratis dari PAUD hingga SMA/SMK secara inklusif, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis.

b. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan;

Program Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah program prioritas nasional pemerintah Indonesia yang pada tahun 2025 difokuskan untuk melakukan revitalisasi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Program ini meliputi:

- 1) Perbaikan ruang kelas dan fasilitas yang rusak sedang hingga berat di banyak satuan Pendidikan;
- 2) Pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang sesuai standar;
- 3) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- 4) Pengalokasian dana bantuan langsung kepada sekolah dengan mekanisme swakelola untuk memastikan partisipasi aktif sekolah dan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan pembangunan;
- 5) Penyaluran dana bantuan dalam dua tahap dengan pengawasan ketat untuk memastikan keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang

layak, memperbaiki kualitas lingkungan belajar agar aman dan mendukung proses pembelajaran yang optimal, serta mewujudkan pemerataan mutu pendidikan sesuai amanat konstitusi Indonesia. Program ini juga menyasar dan mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana antar wilayah dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia, mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui fasilitas pendidikan yang memadai.

Dengan demikian, program ini bukan hanya soal fisik bangunan sekolah, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh dengan memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan berstandar untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan inklusif.

c. Sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang berkeadilan;

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan adalah sistem baru yang menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia mulai tahun 2025 dengan tujuan menciptakan penerimaan siswa yang lebih transparan, adil, dan inklusif. SPMB menekankan prinsip keadilan sosial dengan mengakomodasi calon murid dari berbagai latar belakang, khususnya yang kurang mampu dan penyandang disabilitas, serta mendasarkan penerimaan pada kuota yang jelas dan sesuai kapasitas sekolah.

Sistem Penerimaan Murid Baru ini merupakan penyempurnaan dari system sebelumnya yaitu:

- 1) Pergantian nama dari PPDB menjadi SPMB menjadi simbol penyempurnaan sistem.
- 2) Sistem seleksi yang lebih ketat dan terstruktur untuk mengurangi kecurangan.
- 3) Mekanisme pendaftaran yang lebih mudah (online dan offline).
- 4) Penetapan kuota penerimaan dengan pembagian jalur yang jelas, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
- 5) Penguatan digitalisasi dan transparansi dalam proses seleksi.
- 6) Kebijakan penyesuaian wilayah dan daya tampung sekolah yang melibatkan data administratif resmi (Dapodik dan Dukcapil).
- 7) Pemerataan kesempatan bersekolah dengan mengutamakan jarak domisili ke sekolah terdekat serta dukungan bagi daerah tertinggal atau daerah dengan keterbatasan fasilitas.

Tujuan utama SPMB berkeadilan adalah memastikan semua anak mendapat akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan murid baru, serta menciptakan

pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut adalah rincian kuota penerimaan murid baru per jenjang pada SPMB 2025:

- 1) SD: minimal 70% jalur domisili, 15% afirmasi, 5% mutasi, tanpa jalur prestasi.
- 2) SMP: minimal 40% domisili, 20% afirmasi, 25% prestasi, 5% mutasi.
- 3) SMA: minimal 30% domisili, 30% afirmasi, 30% prestasi, 5% mutasi.

SPMB juga mengatur syarat usia dan kelulusan sesuai jenjang pendidikan untuk memastikan seleksi yang adil dan sesuai kriteria resmi.

Dengan demikian, SPMB merupakan reformasi penting dalam sistem penerimaan murid baru di Indonesia yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas.

d. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru;

Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru perlu dilakukan untuk memastikan guru memiliki standar profesional yang tinggi sehingga mereka mampu memberikan layanan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan zaman dan standar nasional pendidikan. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru, sekaligus memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 serta memiliki sertifikat pendidik yang diakui. Kesejahteraan guru yang baik juga penting agar mereka lebih fokus dan termotivasi dalam tugas mengajar serta membangun pendidikan yang efektif dan bermakna bagi peserta didik.

Tujuan utama dari peningkatan ini adalah:

- 1) Mencetak guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang secara berkelanjutan;
- 2) Memastikan setiap guru memenuhi standar nasional pendidikan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
- 3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga dampak pendidikan menjadi lebih efektif dan bermakna;
- 4) Memberikan guru kesejahteraan yang layak sebagai bentuk penghargaan dan dukungan agar mereka lebih produktif dan berdedikasi;
- 5) Mempercepat pemenuhan sertifikasi guru bagi mereka yang belum tersertifikasi agar pemerataan kualitas guru dapat tercapai di seluruh Indonesia.

Program peningkatan ini, antara lain melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi guru, dan bantuan peningkatan kualifikasi bagi guru yang belum

memiliki pendidikan minimal D4/S1, juga melibatkan pelatihan intensif untuk membekali guru dengan keterampilan praktis dan pedagogik yang relevan dengan tantangan pendidikan masa kini. Dengan kata lain, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru adalah strategi utama pemerintah untuk menciptakan guru yang tidak hanya mampu mengajar tetapi juga menginspirasi dan mendidik generasi penerus yang unggul dan berkarakter.

e. Penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat;

Penanaman pendidikan karakter tidak harus melalui berbagai macam teori, akan tetapi dapat dimulai dari membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu akan terbangun kebiasaan, dari kebiasaan terbentuk kepribadian, dari kepribadian terbangun peradaban.

Kebiasaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan berulang kali tidak hanya membentuk pola hidup, tetapi juga mencerminkan nilai, karakter, dan identitas seseorang. Kebiasaan baik melahirkan karakter yang positif, semen-tara kebiasaan buruk dapat membawa dampak sebaliknya. Untuk itu Kemendikdasmen mencanankan sebuah gerakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak-anak Indonesia sejak dini untuk mendukung penguatan karakter utama bangsa dan mendukung tercapainya delapan dimensi profil lulusan, yaitu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui pembiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan positif yang dapat membentuk karakter anak-anak Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Gerakan ini mendukung pembentukan individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian kuat, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Melalui kebiasaan tersebut, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, kreatif, berkarakter kuat, serta berdaya saing global, sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045.

f. Penguatan karakter melalui pelatihan guru BK dan ke BK-an;

Program Penguatan karakter melalui pelatihan guru BK (Bimbingan dan Konseling) dan ke BK-an merupakan inisiatif strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertujuan memperkuat peran guru BK dalam mendukung pengembangan karakter peserta didik.

Program ini meliputi pelatihan intensif dan bimbingan teknis untuk membekali guru BK dengan kompetensi dalam pendidikan karakter secara sistematis dan terukur, terutama dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Melalui pelatihan ini, guru BK diajarkan bagaimana merancang program bimbingan berbasis capaian pembelajaran serta menilai dampak pendidikan karakter pada siswa, sehingga mereka dapat membimbing siswa secara holistik agar memiliki kecerdasan, keterampilan, kemandirian, cinta tanah air, dan nilai-nilai demokratis.

Tujuan utama program ini adalah menciptakan generasi peserta didik yang tidak hanya unggul akademis, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat dan berintegritas. Dengan memperkuat kompetensi guru BK, diharapkan mereka dapat lebih efektif mendampingi siswa menghadapi persoalan personal maupun akademik, serta menumbuhkan kebiasaan positif yang mendukung perkembangan karakter siswa. Program ini juga meningkatkan kapasitas guru BK dalam menerapkan pendidikan karakter berbasis nilai secara konsisten dan relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini.

g. Pembelajaran mendalam;

Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan memuliakan setiap individu peserta didik. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mereka tidak hanya menghafal materi, tapi benar-benar memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan pengetahuan dan keterampilan secara holistik melalui olah pikir (intelektual), olah hati (etika), olah rasa (estetika), dan olah raga (kinestetik) secara terpadu.

Pembelajaran mendalam harus diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan, mulai dari Paud, jenjang Pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan menengah. Hal ini diterapkan untuk:

- 1) Merespon tantangan krisis pembelajaran dan kebutuhan abad ke-21 yang menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan kemampuan komunikasi serta pemecahan masalah yang tinggi.
- 2) Mengatasi masalah mutu pendidikan yang rendah, seperti literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik.pendidikan.
- 3) Mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan memuliakan martabatnya sebagai individu yang unik dengan pengalaman belajar yang inklusif dan mendukung pertumbuhan.

- 4) Menjadikan proses pembelajaran lebih berkesadaran dan bermakna sehingga peserta didik termotivasi secara intrinsik untuk belajar dan aktif mengembangkan strategi belajar mencapai tujuan.kurikulum.kemdikbud
- 5) Membentuk budaya belajar yang menggembirakan dan memotivasi sehingga siswa terhubung secara emosional dan dapat memahami serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Penerapan pembelajaran mendalam secara umumbertujuan untuk:

- 1) Mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata sehingga peserta didik dapat menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi di masyarakat.
- 2) Membentuk lulusan dengan karakter keimanan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, kesehatan, komunikasi, kolaborasi, dan penalaran kritis yang relevan dengan tuntutan masa depan.
- 3) Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif serta kolaboratif.
- 4) Mengembangkan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan secara holistik sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang kuat dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada transfer materi, tetapi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, karakter, dan keterampilan abad ke-21 melalui pengalaman belajar yang bermakna dan memuliakan peserta didik, dengan tujuan menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan secara optimal.

h. Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial;

Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial (KA) adalah dua bidang pembelajaran yang kini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan, terutama di era digital dan Revolusi Industri 4.0. Koding mengajarkan cara berpikir logis, terstruktur, serta keterampilan *problem solving* dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran koding dapat dilakukan dengan bantuan komputer (*plugged coding*) maupun tanpa perangkat komputer (*unplugged coding*) menggunakan media fisik seperti blok atau kartu.

Sedangkan Kecerdasan Artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan beradaptasi secara otomatis. Dalam

pembelajaran, KA mengajarkan konsep dasar dan cara kerja mesin cerdas, meliputi pemrograman algoritma, analisis data, dan etika penggunaan teknologi. KA diterapkan dalam berbagai bidang, dari asisten virtual hingga analisis data pendidikan.

Pembelajaran Koding dan kecerdasan artifisial harus diperkenalkan sejak dini karena :

- 1) Mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0 yang menuntut keterampilan teknologi tinggi dan literasi digital.
- 2) Mengembangkan keterampilan berpikir komputasional, kritis, kreatif, dan problem solving yang sangat diperlukan di dunia kerja masa depan.
- 3) Membekali generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi yang mampu bersaing secara global.
- 4) Mendorong kemampuan adaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat yang diperlukan di dunia yang berubah cepat.
- 5) Meningkatkan etika dan kesadaran akan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, termasuk kesadaran terhadap dampak sosial dan privasi.

Adapun tujuan pembelajaran pembelajarab Koding dan kecerdasan artifisial adalah :

- 1) Membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir komputasional dan analisis data.
- 2) Meningkatkan keterampilan teknis dalam menulis program komputer dan mengembangkan sistem berbasis kecerdasan artifisial.
- 3) Mengembangkan kompetensi literasi digital dan etika teknologi.
- 4) Mendorong peserta didik mampu membuat produk digital dan solusi berbasis teknologi yang bermanfaat.
- 5) Menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang kreatif, mandiri, dan adaptif dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan.

i. Tes Kemampuan Akademik (TKA);

Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah tes yang diselenggarakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa pada berbagai jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, dan SMA/SMK. TKA menilai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir kritis siswa dalam bidang-bidang keilmuan sesuai kurikulum sekolah dengan menekankan pada *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), yaitu kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penerapan konsep secara mendalam.

TKA bukan ujian wajib seperti Ujian Nasional (UN) yang menentukan kelulusan, melainkan menjadi alat ukur yang bersifat objektif, terstandar, dan akuntabel untuk menilai capaian akademik siswa. Hasil TKA digunakan sebagai salah satu komponen seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya dan sebagai data untuk memetakan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

TKA menggantikan Ujian Nasional yang kurang menilai kemampuan berpikir kritis dan cenderung menguji hafalan. TKA hadir agar penilaian akademik siswa menjadi lebih adil dan setara antar satuan pendidikan, khususnya untuk mengatasi perbedaan standar penilaian antara sekolah. Selain itu, TKA bertujuan mendorong kualitas pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan pemahaman konseptual.

Untuk itu TKA dilaksanakan dengan tujuan meliputi:

- 1) Mengukur capaian akademik siswa secara terstandar dan objektif sebagai dasar seleksi akademik jenjang berikutnya.
- 2) Menjamin kesetaraan akses dan pengakuan hasil belajar siswa dari jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 3) Mendorong peningkatan kapasitas guru dan sekolah dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang berkualitas.
- 4) Memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan secara nasional.

j. Pengembangan talenta dan prestasi;

Program Pengembangan Talenta dan Prestasi adalah inisiatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang fokus pada pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik dan guru, terutama di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), coding, dan kecerdasan buatan, serta penguatan karakter peserta didik. Program ini menargetkan murid jenjang SMP dan SMA yang telah menunjukkan prestasi di tingkat Kabupaten/Kota serta guru yang aktif membina talenta murid. Tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 dengan memberikan pembinaan lanjutan agar talenta dan prestasi dapat berkembang secara optimal, melalui penguatan ekosistem pembinaan talenta yang terstruktur dan inklusif.

Selain itu, program ini juga mencakup program BOS Kinerja Prestasi yang memberikan dukungan dan penghargaan kepada sekolah yang berhasil membina peserta didik berprestasi di berbagai bidang, dengan tujuan menciptakan ekosistem pendukung pengembangan talenta dan prestasi secara berkelanjutan di sekolah. Fokus kegiatan meliputi asesmen talenta, pengembangan program

pembinaan, dan manajemen talenta serta ekosistem sekolah.

Tujuan utama Program Pengembangan Talenta dan Prestasi adalah:

- 1) Menyiapkan dan memperkuat talenta unggul peserta didik di bidang sains, teknologi, riset, dan kreativitas.
- 2) Meningkatkan kompetensi dan prestasi murid dalam konteks nasional dan internasional.
- 3) Memperkuat kapasitas guru sebagai pembina talenta.
- 4) Membentuk ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan potensi dan prestasi anak secara inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal sekaligus memperkuat pendidikan kualitas SDM unggul menuju masa depan Indonesia yang lebih baik kedepan.

k. **Pembangunan kebahasaan dan kesastraan;**

Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan adalah program prioritas yang dijalankan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini berfokus pada tiga aspek utama: literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia.

Adapun tujuan utama dari program ini adalah:

- 1) Meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan di masyarakat Indonesia guna mengatasi kondisi darurat literasi yang masih ada, dengan cara distribusi buku bacaan bermutu ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi.
- 2) Melindungi dan melestarikan bahasa daerah yang terancam punah melalui revitalisasi dan konservasi yang melibatkan komunitas lokal, akademisi, dan pemerintah daerah. Program revitalisasi bahasa daerah ini sudah mencakup banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
- 3) Memperluas jejaring sastra dan menginternasionalisasikan bahasa dan sastra Indonesia, termasuk melalui program Residensi Sastrawan di Mancanegara yang menempatkan sastrawan Indonesia di luar negeri untuk menjalankan misi diplomasi bahasa berbasis sastra. Ini diharapkan dapat memperkenalkan karya sastra Indonesia secara global dan memperkuat posisi bahasa Indonesia di panggung internasional.

Dengan pendekatan yang memanfaatkan teknologi digital dan kolaborasi lintas lembaga, program ini tidak hanya bertujuan mempertahankan keberagaman bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem masyarakat yang berbudaya literasi secara berkelanjutan dan meningkatkan peran bahasa Indonesia di dunia internasional.

- 1) Singkatnya, program ini adalah upaya sistematis untuk:
- 2) Memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara,
- 3) Melindungi dan menghidupkan kembali bahasa daerah,
- 4) Mengembangkan literasi kebahasaan dan kesastraan,
- 5) Memperluas jangkauan bahasa dan sastra Indonesia secara global.

Program pembangunan kebahasaan dan kesastraan bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan mendukung pembangunan budaya literasi yang berkualitas di Indonesia.

I. Penguatan Pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi.

Program penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kompetensi dasar literasi (kemampuan membaca dan menulis), numerasi (kemampuan berhitung dan memahami konsep angka), serta penguasaan sains dan teknologi di kalangan peserta didik. Program ini difokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan yang relevan dengan era digital dan industri 4.0, termasuk penguatan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam.

Program ini memiliki tujuan utama yakni meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas kompetensi literasi, numerasi, dan sains siswa agar lebih mampu menyelesaikan soal dengan pendekatan penalaran dan studi kasus, bukan hanya menghafal fakta.
- 2) Memperkuat kemampuan sains dan teknologi sejak dini, termasuk penerapan mata pelajaran koding dan kecerdasan buatan sebagai pilihan yang mendukung kesiapan siswa menghadapi tantangan zaman.
- 3) Mendukung percepatan peningkatan hasil asesmen pendidikan seperti PISA dengan meningkatkan daya saing nasional dan internasional siswa Indonesia.
- 4) Mengembangkan ekosistem pembelajaran yang melibatkan guru, mahasiswa (sebagai mitra melalui program Kampus Mengajar), dan tenaga pendidik untuk kolaborasi dalam mengakselerasi penguatan kompetensi literasi, numerasi dan sains di sekolah.

- 5) Membantu siswa membangun *soft skills* seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan karakter yang kuat seiring dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program ini dijalankan dengan pendekatan kolaboratif, pelatihan guru, pembekalan mahasiswa pengajar, pembaruan kurikulum dan penyediaan sarana pembelajaran yang mendukung pengajaran literasi, numerasi, serta sains teknologi secara terintegrasi dan kontekstual di sekolah-sekolah prioritas di Indonesia.

3. Peran Widyapraja dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas

Sub materi:

- a. Penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan model penjaminan mutu.
- b. Pendampingan, pembimbingan, dan supervisi satuan Pendidikan.
- c. Pelaporan dan monitoring implementasi kebijakan.
- d. Pengembangan profesionalisme dan kompetensi Widyapraja.

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh yang menjadi dasar peran strategis Widyapraja dalam mendukung implementasi kebijakan dan program prioritas Pendidikan nasional di tingkat satuan pendidikan dan wilayah kerja.

BAB**2****MATERI****A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mengikuti materi Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural yang relevan untuk melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi berbasis data mutu pendidikan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Berikut adalah indikator keberhasilan yang dapat dijadikan acuan:

1. Meningkatnya Kompetensi Teknis Widyaprada; Peserta mampu mendeskripsikan ruang lingkup pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi di satuan pendidikan dan pemerintah daerah sesuai kebijakan dan program prioritas pendidikan nasional.
2. Mampu Melaksanakan Pembimbingan dan Pendampingan; Peserta dapat menentukan bentuk pembimbingan dan pendampingan yang tepat serta melaksanakan fasilitasi yang mendukung pemecahan masalah dan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan analisis data.
3. Tersusunnya Program Pemenuhan Mutu Berbasis Data; Peserta mampu membantu satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan program pemenuhan mutu pendidikan yang prioritas sesuai dengan hasil pemetaan mutu dan kebutuhan lapangan.
4. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Kerja; Terbukti dari hasil uji kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan komunikasi, manajerial, etika profesi, dan integritas dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional Widyaprada.
5. Tercapainya Target Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan; Melalui pelatihan ini, kinerja Widyaprada dapat diukur dari kemampuan mereka dalam mendampingi satuan pendidikan sehingga tercipta peningkatan mutu yang terukur dan berkelanjutan di daerah kerja masing-masing.
6. Evaluasi dan Uji Kompetensi Peserta Pelatihan; Keberhasilan peserta bisa diukur melalui hasil uji kompetensi sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional yang

menilai penguasaan materi kebijakan, program prioritas, dan kemampuan praktik pembimbingan.

Indikator-indikator di atas disesuaikan dengan modul pelatihan dan standar kompetensi jabatan fungsional Widyaprada yang mengedepankan penerapan penjaminan mutu pendidikan berbasis data dan kebijakan nasional secara praktis dan akuntabel.

B. Manfaat bahan ajar bagi peserta

Manfaat bahan ajar kebijakan dan program prioritas pendidikan nasional bagi peserta pelatihan fungsional Widyaprada antara lain:

1. Membantu peserta memahami secara jelas tentang kebijakan, regulasi, dan program prioritas pendidikan yang sedang dijalankan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat menginternalisasi arah dan tujuan pembangunan pendidikan nasional.
2. Peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi satuan pendidikan dengan efektif dan berbasis data mutu pendidikan.
3. Dengan pemahaman yang komprehensif, Widyaprada dapat membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan.
4. Bahan ajar ini membekali peserta dengan cara kerja yang sistematis dalam penjaminan mutu pendidikan, sehingga Widyaprada menjadi agen perubahan yang mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah kerjanya.
5. Peserta mampu menyesuaikan pembimbingan dan fasilitasi dengan dinamika perubahan kebijakan, tantangan lapangan, serta perkembangan teknologi pendidikan, sehingga proses pembinaan berjalan efektif dan relevan.
6. Melalui bahan ajar, peserta memahami peran dan fungsi strategisnya dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada pemerataan akses pendidikan.

C. Pengenalan dan cara penggunaan modul

Modul ini disusun untuk membekali Widyaprada dengan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan pendidikan nasional dan program-program prioritas pemerintah yang bertujuan memberi layanan Pendidikan bermutu untuk semua. Dengan modul ini, Widyaprada diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya secara efektif dalam penjaminan mutu pendidikan.

Adapun penggunaan Modul sepenuhnya disampaikan melalui skema pembelajaran klasikal sebagai berikut:

1. Persiapan Awal
 - a. Pastikan peserta mendapatkan modul dalam bentuk cetak atau digital.
 - b. Berikan gambaran umum tujuan pelatihan dan materi modul.
 - c. Peserta membaca modul secara mendalam sesuai urutan bab/sub materi.
 - d. Mencatat pertanyaan dan poin penting yang akan didiskusikan.
2. Fasilitasi dan Ceramah
 - a. Fasilitator menjelaskan inti materi dan menjawab pertanyaan.
 - b. Menggunakan contoh nyata dari lapangan untuk memperkuat pemahaman.
3. Evaluasi dan Refleksi
 - a. Tes pengetahuan dan keterampilan terkait kebijakan dan program prioritas melalui tanya jawab.
 - b. Refleksi individu tentang kesiapan mengimplementasikan materi di lapangan.

Modul ini dapat digunakan secara efektif untuk membangun kompetensi Widyaprada dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan program prioritas pendidikan nasional sehingga mendukung pelaksanaan pendidikan bermutu untuk semua di wilayah kerja masing-masing.

D. Latihan

Materi Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional hanya 2 jam pelajaran, maka Latihan yang digunakan hanya diformulasikan dalam bentuk Kuiz singkat untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional.

Pertanyaan:

1. Sebutkan tiga program prioritas pendidikan nasional, dan apa alasan Anda menyebutkan tiga hal tersebut?
2. Jelaskan peran Widyaprada dalam mendukung program prioritas Pendidikan!
3. Apa pentingnya data mutu pendidikan dalam pembimbingan dan pendampingan Widyaprada?
4. Sebutkan dua tantangan umum dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional di satuan pendidikan!
5. Apa saja peran Pemda yang diharapkan dalam mendukung Pendidikan bermutu untuk semua ?

E. Rangkuman

Modul ini memberikan pemahaman menyeluruh bagi peserta pelatihan tentang kebijakan pendidikan nasional dan program prioritas yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Materi utama menguraikan:

1. Materi Kebijakan Pendidikan Nasional meliputi; Landasan hukum Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), Visi-misi Pendidikan nasional dan standar nasional Pendidikan, Kebijakan pembelajaran mendalam, Peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Pendidikan, Prinsip pendidikan inklusif dan pemerataan akses Pendidikan, dan Kebijakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan daerah.
2. Materi Program Prioritas Pendidikan Nasional meliputi informasi terkait; Program Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan Pendidikan, Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana Pendidikan, Sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang berkeadilan, Penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceriah, Pembelajaran mendalam, Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial, dan beberapa informasi lain termasuk Penguatan Pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi.
3. Materi Peran Widyaprada dalam Implementasi Kebijakan dan Program memuat informasi terkait; Pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi penjaminan mutu Pendidikan; Pemetaan dan analisis mutu satuan Pendidikan; Monitoring, pelaporan, dan pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan; dan Pengembangan profesionalisme dan kompetensi Widyaprada.

BAB**3****PENUTUP****A. Penutup**

Demikianlah modul materi Kebijakan dan Program Prioritas Pendidikan Nasional ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelatihan fungsional Widyaprada. Melalui modul ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat memperkuat pemahaman tentang kebijakan dan program-program prioritas pendidikan nasional yang strategis dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa tugas Widyaprada sangatlah penting sebagai penggerak peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kemampuan menerapkan kebijakan dan program prioritas akan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Widyaprada. Modul ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk membekali Widyaprada agar mampu berperan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional.

B. Kesimpulan

1. Widyaprada harus memahami dengan baik landasan, tujuan, dan prinsip kebijakan pendidikan nasional serta berbagai program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Melalui pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi mutu pendidikan, Widyaprada berperan penting dalam memastikan program prioritas dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran di satuan pendidikan dan wilayah kerja.
3. Penggunaan data yang akurat menjadi dasar untuk merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
4. Widyaprada perlu terus mengembangkan kapasitas teknis, manajerial, dan sosio-kultural agar mampu menghadapi dinamika kebijakan dan tantangan lapangan demi pencapaian tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
3. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.
4. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Prestasi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/M/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.



PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDIKDASMEN

Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19 Bojongsari, Depok 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174
Website : <https://ppsd.kemendikdasmen.go.id> Email : ppsdm@kemendikdasmen.go.id